

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
BAB II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	a. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
	3.1 Pendapatan
	3.2 Beban
	3.3 Belanja
	3.4 Aset
	3.5 Kewajiban
	3.6 Ekuitas Dana
	b. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, tuntut entitas akuntansi/entitas pelaporan menggunakan basis akrual Pemda
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda
BAB V	Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada SAP. Penerapan SAP harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Isi dari PP No. 71 Tahun 2010, dimana didalamnya tidak hanya memuat standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual di lampiran I tetapi juga SAP berbasis kas menuju akrual di lampiran II. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual, batas akhir penggunaannya sampai dengan tahun anggaran 2014, artinya di tahun anggaran 2015 sudah harus menggunakan SAP lampiran I.

Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. APBD Tahun 2015 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Untuk asas akuntabilitas dan transparansi, APBD yang disusun dan dijalankan tersebut harus ada suatu laporan mengenai APBD tersebut. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan maka perlu disusun suatu laporan dari hasil pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang semuanya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas.

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai beberapa hal, antara lain :

1. Realisasi sasaran yang diharapkan menurut fungsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Realisasi pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
3. Realisasi belanja dalam satu periode yang telah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari Laporan Realisasi Keuangan dan Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diawali dengan

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan.
- BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - a. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
 - 3.1 Pendapatan
 - 3.2 Beban
 - 3.3 Belanja
 - 3.4 Aset
 - 3.5 Kewajiban
 - 3.6 Ekuitas Dana
 - b. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan menggunakan basis akrual Pemda
- BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda
- BAB V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Pendapatan

Pada DPA Kantor Kecamatan Kelapa Tahun 2018 Tidak ada Pendapatan

2.1.2 Beban

Beban disajikan pada Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut :

- a) Beban Pegawai sebesar : Rp. 2.302.865.704,-
- b) Beban Persediaan sebesar : Rp. 91.328.000,-
- c) Beban Jasa sebesar : Rp 1.317.687.801,-
- d) Beban Pemeliharaan : Rp. 132.430.100,-
- e) Beban Perjalanan Dinas : Rp. 259.915.000,-
- f) Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 101.800.456,-

1. Beban Persediaan

Di Beban Persediaan terjadi Perubahan dengan Jumlah Perhitungan Mapping awal Persediaan sebesar **Rp 142.084.500** berubah Jumlah Sebesar **Rp. 141.551.500** yang di dapat dari (**Rp 141.551.500 di Tambah Beban Persediaan tahun 2017 sebesar Rp. 208.000 dan di kurang Beban Persediaan tahun 2018 sebesar Rp 741.000**) dan untuk hasil Beban Persediaan yang di catat di laporan Keuangan sebesar **RP.91.328.000**, yang di dapat dari Jumlah Beban Persediaan **Rp 141.551.500** di Kurang dengan Jumlah **Rp. 50.223.500**, hingga hasil dari pengurangan tersebut sebesar **Rp. 91.328.000 (Nilai Rp 50.223.500 adalah Nilai Reklas atau nilai yang tidak di akui atau tidak di catat di Pengurus Barang tetapi di akui dan di Catat di Laporan Keuangan).**

2. Beban Jasa

Di Beban Jasa Terjadi Perubahan dengan Jumlah Perhitungan Mapping awal sebesar **Rp. 1.267.464.301** dan Berubah Sebesar **Rp. 1.317.687.801**, Perubahan Tersebut di dapat dari hasil Reklas yang seharusnya ada di persediaan tapi karena tidak di akui atau di catat di Pengurus Barang maka di tambahkan ke Beban jasa sebesar **Rp. 50.223.500, (jadi selisih antara Mapping Awal dengan yang di akui dan di catat di Laporan Keuangan sebesar Rp. 50.223.500).**

2.1.3 Belanja.

1. Belanja Operasi

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa belanja operasi Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat setelah tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 4.331.286.500,00,-** (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Dalam pelaksanaannya, belanja operasi tahun anggaran 2018 telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebijaksanaan anggaran seperti tertuang dalam arahan kebijakan umum Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tahun 2018. Sehingga dari anggaran sebesar **4.331.286.500,00,-** terealisasi

sebesar **Rp.4.165.760.885,00,-** (Empat Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dengan persentase keuangan 96,1%, dengan sisa anggaran **Rp. 165.525.615,00,-** (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Bagian belanja operasional terdiri dari belanja:

1. Gaji Pokok
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.289.685.914,- dan terealisasi Rp. 1.229.698.400,- atau 95,34%
2. Tunjangan Keluarga
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 141.238.086,- dan terealisasi Rp. 134.805.148,- atau 95,44%
3. Tunjangan Jabatan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 96.720.000,- dan terealisasi Rp. 93.580.000,- atau 96,75%
4. Tunjangan Fungsional
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi Rp 2.580.000,- atau 73,71%
5. Tunjangan Fungsional Umum
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 49.000.000,- dan terealisasi Rp 44.545.000,- atau 90,90%
6. Tunjangan Beras
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 86.000.000,- dan terealisasi Rp. 80.820.720,- atau 93,97 %
7. Tunjangan PPh
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.060.000,- dan terealisasi Rp. 1.268.114,- atau 41,44%
8. Pembulatan Gaji
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 60.000,- dan terealisasi Rp. 19.791,- atau 32,98%
9. Iuran Asuransi Kesehatan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 37.000.000,- dan terealisasi Rp. 34.853.111,- atau 94,19%
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.511.630,- atau 83,72%
11. Iuran Jaminan Kematian (JKM)

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.100.000,- dan terealisasi Rp. 9.368.290,- atau 84,39%

12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Tunjangan Kinerja Daerah

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 545.960.000,- dan terealisasi Rp. 520.850.000,- atau 95,40%.

13. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Uang Makan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 183.676.000,- dan terealisasi Rp. 147.965.500,- atau 80,55%

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 773.820.000,- dan terealisasi Rp. 761.850.399,- atau 98,45%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 227.000.000,- dan terealisasi Rp. 226.881.000,- atau 99,95%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 44.400.000,- dan terealisasi Rp. 35.929.299 atau 80,92%

3. Penyediaan jasa pengamanan kantor

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 19.850.000,- dan terealisasi Rp. 19.850.000,- atau 100%

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 28.600.000,- dan terealisasi Rp. 26.060.100,- atau 91,12%

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 50.700.000,- dan terealisasi Rp. 50.700.000,- atau 100%

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 26.350.000,- dan terealisasi Rp. 26.350.0000,- atau 100%

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi Rp. 40.000.000,- atau 100%

8. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi Rp. 15.000.000,- atau 100%.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi Rp.4.160.000,- atau 83,20%
10. Penyediaan Peralatan rumah tangga
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%
 11. Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.920.000,- dan terealisasi Rp. 4.920.000,- atau 100%
 12. Penyediaan Makanan dan minuman
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 100.000.000,- atau 100%
 13. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 210.000.000,- dan terealisasi Rp. 210.000.000,- atau 100%.

b. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

- Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 161.120.000,- dan terealisasi Rp. 160.523.280,- atau 99,63%
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 28.000.000,- dan terealisasi Rp. 28.000.000,- atau 99,93%
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi Rp. 15.520.000,- atau 97%
 3. Pengadaan Pameran Pembangunan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi Rp. 15.000.000,- atau 100%
 4. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi Rp. 15.000.000,- atau 100%
 5. Pemeliharaan rutin Kend. Dinas/Operasional
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 72.420.000,- dan terealisasi Rp. 72.322.000,- atau 99,86%
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi Rp. 72.000.000,- atau 100 %
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.500.000,- dan terealisasi Rp. 7.500.000,- atau 100 %

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.500.000,- dan terealisasi Rp. 12.500.000,- atau 100%

1. Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu

Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.500.000,- dan terealisasi Rp. 12.500.000,- atau 100%

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi Rp. 14.000.000,- atau 100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 0,- atau 0%

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%

5. Penyusunan Pelaporan LAKIP,LKPJ,TAPKIN dan LPPD

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%

6. Penyusunan RENSTRA, RENJA dan RKA SKPD

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%

7. Penyusunan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%

e. Program Pembinaan Kehidupan Beragama

1. STQ/MTQ Tingkat Kecamatan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 100.000.000,- atau 100%

f. Program Peningkatan Semangat Kebangsaan

1. Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan dan Perjuangan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi Rp. 70.000.00,- atau 100%

g. Program Penyempurnaan Kualitas Pelayanan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 454.130.00,- dan terealisasi Rp. 450.781.002,- atau 99,26%

1. Fasilitasi Perangkat RT, RW dan Kaling

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 302.580.000,- dan terealisasi Rp. 302.580.000,- atau 100%

2. Administrasi Perkantoran dan Logistik Kantor Lurah Kelapa

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 151.550.000,- dan terealisasi Rp. 148.201.002,- atau 97,79%

h. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 125.509.000,- dan terealisasi Rp. 125.509.000,- atau 100%

1. Pembinaan Pemerintahan Desa

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp.18.000.000,- dan terealisasi Rp. 18.000.000,- atau 100%

2. Penyusunan LKPJ dan LPPD Desa

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.820.000,- dan terealisasi Rp. 3.820.000,- atau 100 %

3. Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Aparatur Pemerintah Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa.

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 26.732.000,- dan terealisasi Rp. 26.732.000,- atau 100 %

4. Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 26.957.000,- dan terealisasi Rp.26.957.000,- atau 100 %

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah di Desa/Kelurahan.
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi Rp. 20.000.000,- atau 100%
6. Kegiatan Pembuatan dan Pengembangan Inovasi Layanan Publik di Kecamatan.
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 17.500.000,- dan terealisasi Rp. 17.500.000,- atau 100 %
7. Kegiatan Rapat-rapat Fasilitasi Kerjasama Desa/Kelurahan di Kecamatan.
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.500.000,- dan terealisasi Rp. 12.500.000,- atau 100%

i. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perpedesaan

1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Kecamatan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi Rp. 59.999.000,- atau 100 %

j. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 39.400.000,- dan terealisasi Rp. 39.200.000,- atau 99,49%

1. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi Rp. 19.800.000,- atau 99%
2. Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.400.000,- dan terealisasi Rp. 9.400.000,- atau 100 %
3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100 %

a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 43.350.000,- dan terealisasi Rp. 41.575.000,- atau 95,91%

1. Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.690.000,- dan terealisasi masih Rp. 8.690.000,- atau 100%
2. Kegiatan Musrenbang Kecamatan
Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 34.660.000,- dan terealisasi Rp. 32.885.000 atau 94.88 %

a. Program Penyelenggaraan Tugas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah

Anggaran dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 27.457.500,- dan terealisasi Rp. 26.957.500,- atau 98,18%

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi Rp.9.500.000,- atau 95 % .
2. Kegiatan Pemilihan Pilkades
Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.457.500,- dan terealisasi Rp.7.457.500 atau 100%
3. Kegiatan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAB-Desa)
Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.457.500,- dan terealisasi Rp. 7.457.500 atau 100%

Pencapaian target kinerja keuangan secara prinsip mengikuti pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD seperti yang telah diuraikan diatas. Begitu juga untuk belanja administrasi umum, pencairan dana/keuangan benar-benar merupakan realisasi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja.

2.2 Hambatan dan Kendala

Pada pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, tidak terdapat hambatan dan kendala.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

a. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan di Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Seksi Pemberdayaan Pemerintah Desa;
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- e. Seksi Tata Pemerintahan;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Subbag Bagian Umum dan Perlengkapan;
- i. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan;

Masing-masing seksi dalam SKPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat merupakan entitas akuntansi dimana masing-masing seksi bertanggung jawab terhadap anggaran yang ada dalam DPA-SKPD tersebut termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Adapaun realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan ataupun disampaikan kepada fungsi Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai entitas Akuntansi PPK-SKPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menyajikan Laporan Keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas, Akuntansi pendapatan

- dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (2) Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- (3) Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- (4) Aset
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (5) Kewajiban
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (6) Ekuitas Dana
- Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2018, dengan besarnya Anggaran belanja Sebesar **Rp. 4.331.286.500,00,-** dan Belum ada Perubahan anggaran.

Laporan keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun secara sentralisasi oleh PPK-SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan seperti aset, kewajiban dan ekuitas dana, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/ diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/ diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan pada buku inventaris bidang aset yang merupakan rekap dari daftar inventaris SKPD. Harga perolehan tersebut memasukkan biaya-biaya lain dalam perolehan dimaksud semisal honorarium dan ATK.

- c. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan mulai berlaku 1 Januari 2010. Untuk menerapkan peraturan Bupati tersebut, maka pada neraca per 29 Juni 2018 dilakukan pemisahan aset dengan nilai perolehan di bawah kapitalisasi, yaitu yang kurang dari Rp 500.000,00 untuk kriteria peralatan dan mesin, Rp 10.000.000,00 untuk kriteria gedung & bangunan, Rp 5.000.000,00 untuk kriteria instalasi & jaringan, Rp 100.000,00. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, untuk seluruh aset dibawah kapitalisasi tidak dimasukkan dalam neraca namun dijelaskan di catatan atas laporan keuangan.

Secara umum pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerapkan penyusutan. Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan yang disusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.1 Penjelasan Neraca

3.1.1 Aset

Nilai aset per 31 Desember 2018 adalah Rp. 1.443.759.627.- terdiri atas :

a. Aset Lancar

Nilai aset lancar kantor camat per 31 Desember 2017 sebesar Rp.741.000.- yang terdiri dari:

a. Dengan Rincian Persediaan Daftar Terlampir

Perbandingan persediaan Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat dibawah ini :

Jenis Persediaan	Per 29 Juni 2018	Per 31 Des 2017
	(Rp)	(Rp)
Persediaan Bahan Habis Pakai	741.000,-	611.000,-
Jumlah	741.000,-	611.000,-

b. Aset Tetap

Nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca per 31 Desember 2018 merupakan penambahan aset per 31 Desember 2018, ditambah aset yang timbul dari belanja modal pada APBD Tahun 2017.

Aset tetap pada neraca Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat ini merupakan kompilasi dari aset tetap yang terdiri dari :

	Per 29 Juni 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
Tanah	16.283.994,00,-	16.283.994,00,-
Peralatan dan Mesin	1.083.104.650,00,-	1.085.500.650,00,-
Gedung dan Bangunan	2.033.666.200,00,-	2.033.666.200,00,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.600.000,00,-	22.600.000,00,-
Aset Tetap Lainnya	740.000,00,-	740.000,00,-
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00,-	0,00,-
Akumulasi Penyusutan	1.816.560.791,00,-	1.758.676.331,00,-
Jumlah Aset Tetap	1.339.834.053,00,-	1.400.114.513,00,-

Dengan Keterangan sebagai berikut :

a. Tanah

Tidak ada penambahan atau berkurangnya asset tanah dari tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 16.283.994,00.

b. Peralatan dan Mesin

Didalam Aset Peralatan dan Mesin ada Perubahan tahun 2017 dan tahun 2018 dengan nilai tahun 2017 Rp. 1.085.500.650,- dan tahun 2018 Rp 1.083.104.650 di karenakan ada nya penambahan belanja modal sebesar Rp. 61.001.280,00,-.

c. Gedung dan Bangunan

Tidak ada penambahan atau berkurangnya aset Gedung dan Bangunan di tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 2.033.666.200,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak ada penambahan atau berkurangnya aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 22.600.000,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada penambahan atau berkurangnya aset tetap lainnya di tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 740.000,00.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Niai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Audited tahun 2017 Rp. 1.758.676.331,00,- dan tahun 2018 ada Perubahan dengan jumlah RP. 1.816.560.791,00,-

Penambahan nilai aset tetap tahun 2018 merupakan akumulasi penambahan nilai aset tetap karena adanya pengadaan di tahun 2018.

c. Aset Lainnya

Niai Aset lainnya Tetap Audited tahun 2017 sebesar Rp. 110.376.650,00,- dan tahun 2018 sebesar Rp 43.916.000,00,-

Hasil dari Aset lainnya yg sebesar Rp.154.292.650,00,- di dapat dari Barang Rusak Berat di tahun 2018 yang di Reklas sebesar Rp. 43.916.000,00 di tambah dengan Aset lainnya di tahun 2017 sebesar Rp. 110.376.650,-.

3.1.2 Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Pada tahun 2018 tidak terdapat Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp.00,-** dan tidak ada utang belanja.

3.1.3 Ekuitas

Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 1.341.959.170,00,-**

3.2 Penjelasan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Kecamatan Kelapa Tahun 2018 disandingkan dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 sudah ada nilainya dikarenakan Laporan Keuangan Tahun 2017 Kabupaten Bangka Barat sudah menggunakan metode accrual basic.

Berikut hal-hal yang yang dapat dijelaskan untuk Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Kelapa :

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp. **1.401.706.627** adalah nilai ekuitas yang diambil dari nilai Ekuitas pada Neraca Audited tahun 2017 sebesar Rp. **1.401.706.627**.

2. Surplus / (defisit) – LO

Nilai Pada Laporan Operasional (LO) Kantor Kecamatan Kelapa 2018 sebesar Rp. **4.206.027.061,-**.

Hasil Jumlah di Surplus / (deficit) - LO di dapat dari Beban persediaan sebesar Rp. 1.401.706.627,- dengan Rincian Sebagai Berikut :

a. Beban Pegawai	sebesar	Rp. 2.302.865.704,-
b. Beban Persediaan	sebesar	Rp. 91.328.000,-
c. Beban Jasa	sebesar	Rp. 1.317.687.801,-
d. Beban Pemeliharaan	sebesar	Rp. 132.430.100,-
e. Beban Perjalanan Dinas	sebesar	Rp. 259.006.000,-

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

- f. Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp. 0,00
- g. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 0,00
- h. Penyesuaian Aset Dibawah Kapitalisasi sebesar Rp. 0,00
- i. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00
- j. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,
- k. Koreksi ekuitas tahun 2018 sebesar Rp. 1.341.959.170,-00,-, dan jumlah Kewajiban tahun 2017 sebesar Rp. 1.401.706.627,00,- tidak ada penghapusan Aset Rusak berat pada Peralatan dan mesin, tidak ada penghapusan Penyusutan tidak ada perubahan dan Aset di bawah Kapitalisasi tahun 2018 sebesar Rp. **19.481.280,-** ,

- l. Kewajiban yang harus dikonsolidasikan sebesar Rp. **4.165.760.885,00,-** merupakan hasil akhir dari surplus deficit dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
- m. Ekuitas Akhir pada LPE sebesar Rp. **1.341.959.170,00,-** harus sama dengan jumlah ekuitas pada laporan Neraca.

3.3 Penjelasan pada Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional Kecamatan Kelapa Tahun 2018 disandingkan dengan Laporan Operasional Tahun 2017.

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi daerah pada Kantor Camat Kelapa tahun 2018 sebesar Rp. 00,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 00,-.

2) Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Kantor Camat Kelapa tahun 2018 sebesar Rp. **2.302.865.704,-** dan pada tahun 2017 sebesar **Rp 1.894.304.252,00,-**.

3) Beban Persediaan

Beban Persediaan pada kantor camat kelapa tahun 2018 sebesar Rp. **91.328.000,00,-** dan pada tahun 2017 sebesar Rp. **85.750.000,00,-**, sumber nilai Beban Persediaan tahun 2018 bukan hanya di dapat nilai dari Beban Persediaan tetapi didapatkan juga dari rincian sbb :

- Penambahan Aset di bawah Kapitalisasi sebesar Rp. **19.481.280,00,-** yang merupakan Pengadaan Belanja Modal berupa Horden yang nilai nya di bawah Kapitalisasi

4) Beban Jasa

Beban Jasa pada kantor camat kelapa tahun 2018 sebesar Rp. **1.317.687.801,00,-** dan pada tahun 2017 sebesar Rp. **2.170.788.977,00,-**.

5) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada kantor camat kelapa tahun 2018 sebesar Rp. **132.430.100,-** dan pada tahun 2017 sebesar Rp. **23.550.000,00,-**.

6) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada kantor camat kelapa tahun 2018 sebesar Rp. **259.915.000,00,-** dan pada tahun 2017 sebesar Rp. **269.006.000,00,-**.

7) Beban Penyusutan aset

Beban Penyusutan aset pada kantor camat kelapa berubah dengan Jumlah Rp. 101.800.456,00,-.

8) Surplus/(defisit) LO

Surplus/Defisit LO tahun 2018 sebesar Rp. **4.206.027.061,00,-** sedangkan tahun 2017 sebesar Rp. **4.539.196.545,00,-**.

3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Belanja Operasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
- Belanja Pegawai	2.450.000.000,00,-	2.302.865.704,00,-	94%
- Belanja Barang	1.819.786.500,00,-	1.801.893.901,00,-	99%
- Bunga	0,00	0,00	-
- Subsidi	0,00	0,00	-
- Hibah	0,00	0,00	-
- Bantuan Sosial	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi	4.269.786.500,00	4.104.759.605,00	96,1%

Dengan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi yang di tetapkan di DPA Kecamatan Kelapa sebesar Rp.0 dan hanya terealisasi sebesar Rp 0.
2. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai yang di tetapkan di DPA Kecamatan Kelapa sebesar Rp. 2.450.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 2.302.865.704,00 atau 94%.
3. Belanja Barang / Jasa
Belanja Barang/Jasa yang di tetapkan di DPA Kecamatan Kelapa sebesar Rp. 1.819.786.500,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 1.801.893.901,00, atau 99%.
4. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial yang di tetapkan di DPA Kecamatan Kelapa sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0
5. Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Peralatan dan Mesin yang di tetapkan di DPA Kecamatan Kelapa sebesar Rp. 61.500.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 61.001.280,00 atau 99,19%.

Pada tahun anggaran 2018, Kecamatan Kelapa tidak ada mengelola dana dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
- Belanja Tanah	0,00	0,00	-
- Belanja Peralatan dan Mesin	61.500.000,00	61.001.280,00	99,19%
- Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	-
- Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Modal	61.500.000,00	61,001.280.00	99,19%

Dengan Penjelasan Belanja Modal Sebagai Berikut :

1. Belanja Modal

Belanja Modal yang ada hanya di Peralatan dan Mesin yang sebesar Rp.

61,001.280,,00 dengan rincian sebagai beriku :

- Laptop sebanyak 3 unit
- Horden sebanyak 78 Buah
- Laptop sebanyak 1 Buah
- Printer sebanyak 2 Buah
- Kipas Angin sebanyak 2 Buah

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disajikan bersamaan dengan laporan keuangan lainnya yaitu Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga merupakan satu kesatuan yang komprehensif. Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara jelas dan mudah oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya untuk manajemen entitas pelaporan ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga oleh masyarakat publik.

Lebih lanjut, penyajian CALK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan yang akurat atas laporan keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab.

Demikian gambaran singkat mengenai laporan keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2018. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat .

Kecamatan Kelapa, Desember 2018
KEPALA SKPD



SYAMSIAR, S.IP
NIP. 19670619 198903 1 003